

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penduduk Indonesia sebagian besar bermukim di pedesaan sehingga akses yang dimiliki terbatas. Upaya yang dilakukan untuk mendorong pembangunan daerah pedesaan diperlukan adanya lembaga-lembaga perkreditan yang khusus untuk menunjang pembangunan daerah dengan membantu memberikan sarana dan prasarana baik berupa dana, pelatihan maupun jasa dengan tujuan dapat menanggulangi terbatasnya sumber daya yang ada di pedesaan.

Seringkali suatu desa memiliki potensi sumber daya alam yang kaya, namun kesejahteraan masyarakat dan ekonomi wilayah rendah, hal ini dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana pendukung produksi dan lemahnya permodalan masyarakat dalam mengembangkan sumber daya. Salah satu kendala utama dalam pengembangan ekonomi desa adalah terbatasnya lembaga keuangan di pedesaan, sehingga melambatkan pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat dan desa. Implikasinya mengakibatkan adanya keterbatasan penyerapan tenaga kerja, kesempatan usaha maupun peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan realitas wilayah pedesaan yang demikian maka perlu terobosan seperti kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yaitu antara lain dengan pembangunan lembaga keuangan mikro di desa (Tampubolon 2009).

Menurut Undang- Undang pasal 1 ayat 1 tentang Lembaga Keuangan Mikro bahwa Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Baskara, 2013).

Menurut Krishnamukti (2003) *dalam* Karay (2012), dalam skala yang lebih makro, keberadaan LKM di pedesaan dapat menjadi faktor kritikal dalam usaha penanggulangan kemiskinan yang efektif di pedesaan. Peningkatan akses dan

pengadaan sarana penyimpanan, pembiayaan dan asuransi yang efisien dapat membangun keberdayaan kelompok miskin dan peluang mereka untuk keluar dari kemiskinan, melalui: (1) tingkat konsumsi yang lebih pasti dan tidak berfluktuasi, (2) mengelola risiko dengan lebih baik, (3) secara bertahap memiliki kesempatan untuk membangun aset, (4) mengembangkan kegiatan usaha mikronya, (5) menguatkan kapasitas perolehan pendapatannya, dan (6) dapat merasakan tingkat hidup yang lebih baik.

Menurut Ferdian (2016) bahwa keberadaan dan perkembangan LKM tidak terlepas dari perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat dipandang sebagai pola katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Di Kabupaten Bangka Tengah sendiri, dengan adanya lembaga pengkreditan masyarakat dapat mengembangkan usaha mikro dan kecil (UMK) maka dapat menjadi suatu penggerak perekonomian masyarakat, hal ini dapat dilihat dari perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Dari tahun 2012 hingga 2014 jumlah UMK yang ada di Kabupaten Bangka Tengah terus mengalami peningkatan. Dimana UMK ini mengalami peningkatan sebesar 1,1 persen pada tahun 2013 dan 1,9 persen pada tahun 2014. UMK di Kabupaten Bangka Tengah ini sendiri didominasi oleh UMK yang bergerak disektor industri pertanian serta sektor perdagangan dan aneka usaha, dimana pada tahun 2014, kedua sektor tersebut berturut-turut tercatat sebanyak 16.630 unit dan 14.928 unit. Sehingga Lembaga Keuangan Mikro dapat sebagai pendukung kelancaran dalam pengembangan perekonomian masyarakat baik melalui Usaha Mikro Kecil (UMK), pertanian, dan perikanan.

Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan merupakan lembaga yang didirikan oleh pemerintah daerah yang kepemilikan modal dan pengelolannya dilakukan oleh pihak pemerintah Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan lima desa yang terkait, yaitu masyarakat yang berada di wilayah pesisir pantai (kepulauan) : Desa Guntung, Terentang III, Penyak, Kurau Timur dan Kurau Barat. Lima desa tersebut sudah

masuk dalam Data Dasar Rumah Tangga (DDRT) dan Sasaran Rumah Tangga (SRT) serta peta FSVA (Profil LKM KMP Kebersamaan, 2013).

LKM ini dibentuk dengan tujuan menjadikan daerah yang terkait menjadi kawasan mandiri pangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat kurang mampu di desa rawan pangan melalui kelembagaan yang mandiri, transparan, profesional dan sebagai solusi pembiayaan masyarakat Pedesaan. Sehingga LKM dapat sebagai wadah layanan permodalan kepada masyarakat dalam mengembangkan usaha mikro, usaha kecil maupun usaha menengah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin atau rawan pangan dengan melakukan pendampingan partisipatif serta meningkatkan diversifikasi pangan yang bersumber dari bahan baku lokal.

Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan yang terdapat di Kecamatan Koba memiliki unit usaha yaitu unit usaha simpan pinjam, budidaya, pemasaran produk, Pengelolaan hasil pertanian dan perikanan, serta sewa jasa. Pembangunan setiap unit usaha pada Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan diharapkan mampu memberikan manfaat kepada masyarakat di Kecamatan Koba, baik dari sisi ekonomi maupun sosial

Melihat dari tujuan Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan di Kecamatan Koba, peneliti tertarik untuk melihat mekanisme pembentukan LKM-KMP Kebersamaan dan ingin menganalisis peran dari keberadaan LKM-KMP Kebersamaan dengan perkembangan unit usaha yang dijalankan serta melihat peningkatan perekonomian masyarakat maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peran Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah”.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah?
2. Bagaimana peran Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui mekanisme pembentukan Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah
2. Menganalisis peran Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah

1.4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai referensi bagi pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terkait dengan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pengelola untuk memajukan setiap unit usaha Lembaga Keuangan Mikro Kawasan Mandiri Pangan (LKM-KMP) Kebersamaan
3. Sebagai acuan dan informasi bagi penelitian selanjutnya dengan kajian aspek dalam ruang lingkup yang lebih mendalam.